

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori pembelajaran sosial**

Teori pembelajaran sosial yang dijelaskan oleh Bandura (1994), tingkah laku sering dievaluasi, yaitu bebas dari timbal balik sehingga boleh mengubah kesan-kesan personal seseorang. Proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura (1994) menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar social jenis ini.

Alasan pemilihan teori ini adalah bahwa tindakan manusia jika dievaluasi secara terus menerus akan menimbulkan kesan-kesan bagi individu-individu tersebut, kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan pajak. Jika pemeriksaan dilakukan secara keberlanjutan kepada wajib pajak akan menimbulkan efek jerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

##### **2.1.2. Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.3. Pemeriksaan Pajak**

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan tidak dikenakan pajak, yaitu dengan tidak meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya: cukai tembakau atas rokok putih putih (luar negeri) dihindari dengan memuaskan diri dengan rokok klobot/ tingwe (surogat). Maka dari itu jika terdapat kejanggalan dalam pembayaran pajak bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPP, dan pastinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan pajak oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

#### **2.1.4. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;

3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

#### **2.1.5. Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria Wajib Pajak Badan yang diperiksa untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.
2. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak

5. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

#### **2.1.6. Sasaran Pemeriksaan**

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

*Tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

### **2.1.7. Jenis-Jenis Pemeriksaan**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011;2008) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang berlangsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
2. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan

b. Pemeriksaan khusus ini dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktur Jendral Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:

- c. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar;
- d. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
- e. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)

#### **2.1.8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan**

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu

penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### **2.1.9. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

1. Meminta pemeriksa pajak:
  - Memberikan pemberitahuan secara tertulis
  - Memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan;
  - Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  - Memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
2. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
3. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan
4. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
5. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak

#### **2.1.10. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

- A. Memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau pembukuan
- B. Memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau



mengunduh data elektronik

- C. Memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan
- D. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- E. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- F. Memberikan keterangan lain yang diperlukan

#### **2.1.11. Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui dalam pemeriksaan**

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok pemeriksa.

- a. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
- b. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

#### **2.1.12. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak**

Menurut Hutagaol (2010), Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

a. Teknologi informasi (*information technology*)

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT).

b. Jumlah sumber daya manusia (*the number of human resources*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

c. Kualitas sumber daya (*the quality of human resources*)

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

d. Sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit facilities*)

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. Contohnya *Audit Command Language* (ACL), sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

**2.1.13. Tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:**

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahaptahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya sebagai berikut yang dikemukakan oleh Rahayu (2010):

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

## 2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

## 3. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan
- c. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

### 2.1.14. Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010), indikator pemeriksaan pajak adalah Laporan pemeriksaan pajak yang merupakan dasar untuk

penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2016 hingga 2017. Menurut Rahayu (2010), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Waluyo (2011), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

#### **2.1.15. Penerimaan Pajak**

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang

sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan andal, karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijayanto, 2012)

Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih sebelum pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang

dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang (Salip dan Wato, 2006)

#### **2.1.16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Adanya faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak ialah tariff pajak itu sendiri (Syahputra, 2006)

#### **2.1.17. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Deviano dan Rahayu (2006) Mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **2.1.18. Indikator Kepatuhan**

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Apabila indikator kepatuhan pajak semuanya terlaksana maka dengan itu akan meningkatkan penerimaan pajak.

## **2.2. Perumusan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengembangan Hipotesis**

- **Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak**

Menurut Bandura (1994), yang menjelaskan mengenai tingkah laku yang sering dievaluasi, dan akan menimbulkan efek jera serta motivasi diri. Motivasi diri yang dijelaskan oleh Bandura (1994) yaitu ; adanya dorongan masa lalu, dorongan yang dijanjikan dan dorongan yang kentara.

Salah satu penyebab meningkatnya penerimaan pajak yaitu pemeriksaan pajak yang berkelanjutan. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam



membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Wijayanto (2012) Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif. Sejalan dengan Paula (2015) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.**

### **2.2.2. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Gambar akan menyajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini.

